Mega Proyek Jalan Pelang-Batu Tajam Tak Selesai

Dewan Saran PT Marga Mulia Di-*blacklist*

KETAPANG, SP – Proyek pembangunan peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam senilai Rp56 miliar dari APBD Ketapang tahun anggaran 2019 belum selesai dikerjakan hingga batas waktu kontrak.

Tenaga Operasional PT Marga Mulia, Kriyono selaku pelaksana mega proyek tersebut mengakui keterlambatan pengerjaan proyek. Pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang.

"Kami sudah rapat dengan Dinas PU, saat ini kami sedang melengkapi administrasi untuk permohonan pengajuan perpanjangan 40-50 hari ke depan," katanya, Senin (30/12).

Diakui Kriyono, keterlambatan pengerjaan proyek dikarenakan berbagai kendala. Beberapa di antaranya faktor cuaca dan tekstur dasar jalan yang dibangun.

"Kendala kita banyak, seperti faktor alam, dasar jalan yang merupakan gambut dan lainnya," akunya.

Abdul Sani
Anggota DPRD Ketapang

Kontrak sudah habis namun pelaksanaan di lapangan baru 70 persen, artinya bisa dikatakan pelaksana gagal menjalankan kewajiban menyelesaikan proyek

Pihaknya diyakini Kriyono siap menerima konsekwensi keterlambatan, termasuk denda selama perpanjangan waktu pengerjaan proyek dan kerusakan pada jalan yang baru dibangun.

"Untuk yang rusak-rusak akan kita perbaiki, yang jelas kita siap menerima konsekuensinya dan siap bertanggung jawab," yakinnya.

Sementara itu anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani menyayangkan keterlambatan pembangunan Jalan Pelang-Batu Tajam. Nilai proyek tersebut katanya terbesar di Ketapang pada 2019.

"Kontrak sudah habis namun pelaksanaan di lapangan baru 70 persen, artinya bisa dikatakan pelaksana gagal menjalankan kewajiban menyelesaikan proyek," ungkapnya, Senin (30/12).

Harusnya menurut Abdul Sani, Pemkab Ketapang berani memberikan sanksi tegas kepada pelaksana proyek yang dianggap lalai mengerjakan tepat waktu.

"Harusnya tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan, kalau tak selesai, dibayarkan sesuai yang dikerjakan saja, kemudian pelaksana disanksi peringatan hingga *blacklist* apalagi tahun 2019 sudah tutup," tegasnya.

Ke depan ia meminta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selaku penyelenggara lelang pekerjaan, serius memilih dan memperhatikan pemenang lelang.

Menurut dia, terpenting sebenarnya bukan soal siapa yang mendapatkan tander atau lelang proyek, tetapi siapa yang mampu menyelesaikan proyek sesuai aturan dan tepat waktu.

"Dengan waktu kontrak yang ada harusnya proyek bisa selesai, jangan salahkan alam, karena kita juga tahu berapa intensitas hujan dan berapa lama hari panas. Kalau pelaksana tidak sanggup harus legowo mengakui dan tidak mencari alasan, kalau seperti ini anggaran yang besar yang disediakan terkesan sia-sia," nilainya.

Abdul Sani berharap pihak berwenang untuk mengecek kondisi fisik pelaksanaan pembangunan untuk memastikan anggaran besar yang disediakan disertai dengan kualitas pembangunan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Nanti kita minta aparat hukum atau instansi terkait mengecek mutu pembangunan, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas pembangunan," tegasnya. **(teo/jee)**

RUSAK – Salah satu titik Jalan Pelang-Batu Tajam yang kembali rusak usai pengerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh PT Marga Mulia. Dewan menyarankan Pemkab Ketapang memberikan sanksi tegas kepada pihak pelaksana pengerjaan.